

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA**

(Studi pada BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**DWI BANGUN PRASETIYO**

**NPM : 1521030350**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA**

(Studi pada BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)

## **Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : Dr. Drs. Maimun. S.H.,M.A.**

**Pembimbing II : Badruzzaman. S.Ag.,M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Koperasi syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Peran strategi koperasi tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama koperasi syari'ah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien termasuk koperasi syari'ah didalamnya. Kegiatan usaha yang mempergunakan dana atau dalam pengelolaan dana oleh koperasi dijadikan sebagai prioritas dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), yang dapat diartikan sebagai suatu struktur, system dan proses yang mengatur arah dan kinerja sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika sebuah institusi koperasi ingin maju dan berkembang harus melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada koperasi syari'ah persoalan *Corporate Governance* konvensional dan syari'ah mempunyai kewajiban dan peraturan yang berbeda yaitu hukum syari'ah dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan kepercayaan kepada anggota berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang diberlakukan BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa.

Dalam skripsi ini penyusun akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang mencakup aspek *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *indepency*, dan *fairnees* pada BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa dan penyusun juga akan meninjau pelaksanaan tersebut dilihat dari hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana penyusun mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam berupa wawancara dengan pihak BMT dan nasabah, observasi terhadap fenomena yang terjadi dan mendokumentasikan data tersebut. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi yang bersifat fakta. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah analisis yuridis. Penulis mengambil jumlah sampel 89 anggota dengan *random sampling* terdapat 12 orang, 3 dari pihak BMT dan 9 dari pihak anggota. Sehingga diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan metode yang digunakan telah diketahui bahwa masyarakat mengenal *Good Corporate Governance*, hal ini dibuktikan dalam analisis prinsip-prinsip di antaranya, adanya keterbukaan informasi dari pihak BMT dengan anggota maupun nasabah (*transparency*), kejelasan fungsi, aturan, dan tugas setiap jabatan, (*accountability*), patuh terhadap peraturan perundang-undangan (*responsibility*), dikelola secara profesional tanpa intervensi pihak manapun (*indepency*), dan keadilan dalam perlakuan kejelasan hak anggota koperasi (*fairnees*).

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu sebagai Lembaga yang dapat menghimpun dana masyarakat dengan pengelolaan secara profesional (fathonah), kejujuran (shiddiq), kepercayaan (amanah). dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat (tabligh).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Ht. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **EMA**

NPM : **1521010013**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**

Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM**

**DALAM PERKARA HADHANAH (Studi Putusan**

Nomor: **1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor**  
**62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.,**

**NIP: 195904161987031002**

**Pembimbing II**

**Dr. KH. Khairuddin, M.H.**

**NIP: 196210221993031002**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**NIP: 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol.H.Endro Suratmin Kampus Sukarame Lampung, Telp.(0721)70403

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA (Studi pada BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)** disusun oleh : **Dwi Bangun Prasetyo,**  
NPM : **1521030350,** Fakultas : **Syari'ah,** Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**  
Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada : **Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : **Dr. Liky Faisal, S.Sos.,M.H.**

Sekretaris : **Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag**

Penguji Utama : **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

Penguji I : **Dr. Drs. Maimun, S.H.,M.A.**

Penguji II : **Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**



Mengetahui,  
Dean Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP.19621022 199303 31002



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

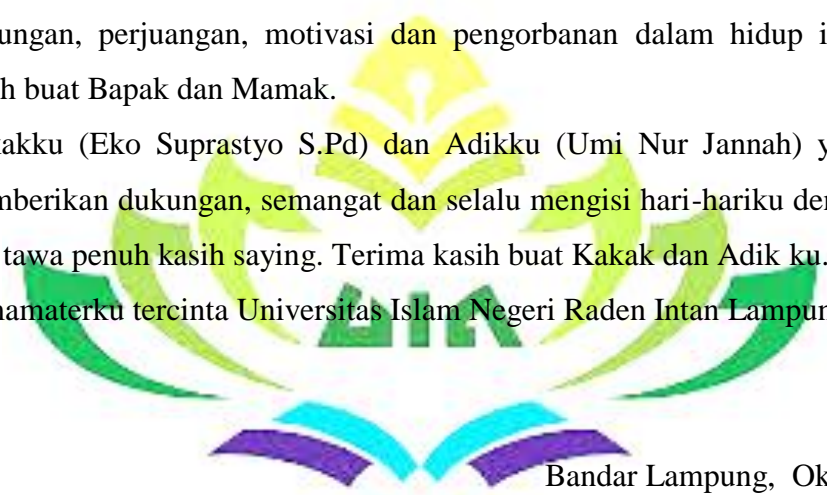
(QS. An-nisa (4) : 58)



## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur ku persembahkan pada Allah Yang Maha Kuasa berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang :

1. Kedua orang tua ku Bapak (Rokhani) dan Ibunda (Ngatini) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Bapak dan Mamak.
2. Kakakku (Eko Suprastyo S.Pd) dan Adikku (Umi Nur Jannah) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda dan tawa penuh kasih sayang. Terima kasih buat Kakak dan Adik ku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Oktober 2019

**Dwi Bangun Prasetyo**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Bangun Prasetyo  
Alamat : Sumbersari RT 002/002 Pekon Kresnomulyo  
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu  
Tempat Tanggal Lahir : Sumbersari, 03 Agustus 1994  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Islam

Pendidikan :

- TK YASMIDA II Ambarawa (2000-2001)
- SD N 5 Kresnomulyo (2001-2006)
- SMP N 1 Ambarawa (2006-2009)
- SMA YASMIDA Ambarawa (2009-2012)
- Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) (2015-2019).

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis

**Dwi Bangun Prasetyo**



## KATA PENGANTAR

Seiring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berpikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Simpanan dan Pinjaman Anggota** (Studi pada BMT Asy-syafiyyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu).”

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam perilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan formil partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya dan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I. dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. Drs. Maimun, S.H., M.A. dan pembimbing II Badruzzaman. S.Ag., M.H.I. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikannya syarat-syarat administrasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literature dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Harum Mawar Lestari, yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dukungan, dan do'anya.
9. Sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi khususnya Muhammad Suhaidi. S.E., Hilmi Yusron Rofi'i., S.H., Ahmad Khudlori. S.H., Mustajab. S.H., dan



kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarabbal a'llamin.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis



**Dwi Bangun Prasetiyo**  
NPM. 1521030350

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikansi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian.....	8

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	16
B. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	20
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	20
2. Prinsip-prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	24
3. Sejarah Singkat <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Indonesia ....	33
4. Manfaat dalam Hukum Ekonomi Syariah (HESy) .....	37
5. Hikmah di Syariatkan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	41
C. Tinjauan Pustaka .....	47

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa .....	51
1. Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT).....	51
2. Sejarah Berdirinya BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa.....	52
3. Landasan Hukum .....	54
4. Visi dan Misi .....	58
5. Struktur Organisasi.....	59
6. Produk-produk BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa.....	62



B. Strategi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di BMT Assy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu .....	67
---	----

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Pengelolaan Simpanan Nasabah di BMT Assy- syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu .....	71
B. Hukum Islam Tentang <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	73

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Rekomendasi.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Agar tidak menimbulkan disintrepretasi atau salah penafsiran mengenai maksud judul skripsi ini, maka perlu diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Simpanan Anggota Baitul Maal Wa Tamwil ” yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari )<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah kaidah, adat, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, Pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>2</sup>
3. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas, (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), indepedensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairnees*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka, 2002), edisi ketiga, h. 620.



4. Pengelolaan adalah pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari pihak lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (untung).<sup>4</sup>
5. Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>5</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai wujud pengelolaan dana anggota yang ada di Koperasi syariah yang dalam hal ini adalah Baitul Maal Wa Tamwil di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Salah satu fungsi koperasi syariah yang dalam hal ini BMT yakni melakukan pengelolaan dana anggota yang telah di titipkan, tentu asas kepercayaan menjadi salah satu faktor alasan penting masyarakat ingin menjadi nasabah pada BMT, sehingga perlu adanya suatu prinsip untuk menjaga kepercayaan itu yang dalam hal ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan suatu tata kelola yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 490.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 240.

keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas, (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairnees*).

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini realvan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syariah pada Jurusan Muamalah.
- b. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia sehingga skripsi diharapkan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- c. Keinginan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam atau pandangan hukum Islam terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada pada lembaga koperasi syariah.

## C. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia lembaga keuangan maupun non keuangan sangat diperlukan pengelolaan sistem secara benar dan tepat. Dalam hal ini mekanisme pengelolaan harus dilakukan secara baik dan tepat agar koperasi tersebut dapat melaksanakan visi dan misi serta tujuan sesuai apa yang diinginkan. Pengelolaan dimaksudkan di sini merupakan strategi dalam mengatur sistem agar dapat menghasilkan hal yang telah ditentukan seperti visi, misi perusahaan.<sup>6</sup>

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya secara jangka panjang memerlukan banyak strategi yang harus dilakukan salah satunya adanya penerapan *Good Corporate Governance* sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap *Stakeholder*. GCG merupakan suatu tata kelola yang baik yang

---

<sup>6</sup> Ariestya dan Ardiana (2016). "*Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Perusahaan Sektor Keuangan dengan Manajemen Risiko sebagai Variabel Intervening.*" E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16, No.2, h. 146.

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas, (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), indepedensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairnees*).<sup>7</sup> Salah satu lembaga non keuangan yang tidak terlepas dari penerapan GCG adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperkoperasian yang sifatnya informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perkoperasian dan lembaga keuangan formal lainnya. Salah satu fungsi BMT merupakan sebagai lembaga panerima dan penyalur dana masyarakat sehingga perlu adanya penerapan GCG sebagai wujud tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan dilakukan pengelolaan secara baik maka perusahaan tersebut akan mendapatkan reputasi yang baik dan akan menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi sehingga mereka bisa menjadi anggota yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan. Untuk meningkatkan persentase anggota setiap periodenya perlu dilakukan beberapa evaluasi per periodenya agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga ketika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dapat ditinjau kembali.<sup>8</sup>

Melaksanakan peninjauan persentase anggota setiap periodenya merupakan salah satu cara dalam mengelola koperasi secara baik dan benar. Untuk melaksanakan pengelolaan secara baik, dapat diterapkan sistem *Good Corporate Governance* atau GCG.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesian (PBI) No. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)* pada bagian Umum.

<sup>8</sup> *Ibid.*



Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri koperasi. Situasi eksternal dan internal perusahaan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha lembaga koperasi syariah kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat *good corporate governance* dibidang lembaga keuangan non perkoperasian yang dalam hal ini BMT. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing koperasi itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anggota, agar anggota dapat percaya terhadap industri koperasi. Penerapan GCG menjadi suatu kebutuhan mengingat Koperasi memiliki fungsi mengelola dana publik (anggota).

Penerapan GCG berawal dari krisis perkoperasian di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 2000, krisis tersebut terjadi tidak hanya dikarenakan krisis ekonomi dan merosotnya nilai tukar rupiah saja tetapi juga dikarenakan belum dilaksanakannya Good Corporate Governance. Pada saat itu terjadi beberapa hal yang menyebabkan minat masyarakat berkurang terhadap dunia perkoperasian, salah satu dari hal tersebut adalah tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan anggota. Di karenakan alasan tersebut reputasi perkoperasian nasional menjadi jelek. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada industri perkoperasian, usaha ini dilakukan dengan cara melakukan tindakan penting salah satunya adalah dengan melakukan penerapan GCG, selain penerapan GCG juga harus melakukan tindakan penting lainnya yaitu melakukan ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian

dan juga sangat penting diperlukannya pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas koperasi.<sup>9</sup>

Penerapan GCG sangat penting dalam lembaga keuangan syariah atau lembaga non keuangan syariah terutama yang melakukan kegiatan perkoperasian sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al- Qur'an dan hadist. Secara umum, fungsi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana anggota. Karena itu prinsip-prinsip GCG pada lembaga keuangan syariah ataupun lembaga non keuangan syariah sangat penting untuk diterapkan adapun *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar.<sup>10</sup>

Untuk dapat mewujudkan *Good Governance* dalam hukum Islam, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu : syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah,

---

<sup>9</sup> Rinda Asytuti, *Implementasi GCG di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 54.

<sup>10</sup> Muhammad dong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam* ( Makasar : Edukasi Mitra Grafika, September 2017), h. 100.

serta orientasi ke hari depan.<sup>11</sup> Sehingga dengan adanya GCG dalam kajian hukum tentu menjadi salah satu solusi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan yang akan menerapkannya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap GCG dalam Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Anggota (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Pringsewu).

#### **D. Fokus Masalah**

Fokus penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) dalam simpanan anggota di BMT asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah pengelolaan dana anggota BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sudah mencerminkan *Good Corporate Governance* (GCG)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam* (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma), Jurnal Muqtasid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015), h. 25-39.



- a. Untuk mengetahui pengelolaan *Good Corporate Governance* (GCG) dana simpanan anggota di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pingsewu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *Good Corporate Governance* (GCG).

### **G. Signifikansi Penelitian**

Secara spesifik Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-pemasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan Anggota pada Koperasi Syariah.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum Ekonomi Syariah.

### **H. Metode Penelitian**

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahannya. metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya. Metode adalah suatu

cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>12</sup>

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode penelitian ini merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.<sup>13</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan dilakukan dalam kancan hidup sebenarnya.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada terhadap suatu fenomena. Penelitian metode kualitatif dapat diartikan

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

<sup>13</sup> Suharto Dkk., *Perekayasaan Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 99.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986), h. 123.

sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh masalah pada pihak BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada data pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur yang lain sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang

---

<sup>15</sup> Bagon Suyantos, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.166.



menjadi objek penelitian<sup>16</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 12 orang yang terdiri dari 3 orang pihak BMT dan 9 orang anggota.

b. Sampel

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>17</sup> Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.

Mengacu kepada pendapat tersebut di atas, penulis mengambil jumlah sampel dengan *random sampling* karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 12 orang, maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Wawancara

---

<sup>16</sup> Eta Mamang, Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi, 2010), h. 44.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 118.

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>18</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan anggota yang menjadi sampel penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan berupa alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu yang menjadi fokus penelitian serta mencatat tentang sesuatu yang berhubungan pandangan hukum Islam terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Anggota Pada BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

c. Dokumentasi

Yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

---

<sup>18</sup> Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cet.4 (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), h. 39.

rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data dengan arsip, buku, dan lain sebagainya yang ada dan terdapat di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

### a. Pemeriksaan Data

Verifikasi merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil rekaman data tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut ataupun rekamn tersebut perludilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut. Kegiatan pemeriksaan hasil rekaman data lapangan merupakan kegiatan penting dalam pengolahan data, proses penyaringan data pertama ini merupakan kunci apakah data yang telah diperoleh tersebut mampu memberikan penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan untuk keperluan pembuktian suatu masalah atau fenomena yang diamati, ataukah hal yang sebaliknya terjadi.<sup>20</sup>

### b. Penandaan Data (*coding*)

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h 206.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 174.



Dalam proses pengolahan data, coding dapat diartikan sebagai usaha untuk mengklasifikasikan data menurut jenis dan ragamnya.<sup>21</sup>

Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan Hasil

Dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai fakta yang telah ditemukan, yang pada akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

**6. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari data BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 178.

Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan dana simpanan anggota.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*,... h. 352.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Prinsip-prinsip Keuangan Syari'ah**

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya akan membutuhkan orang lain. Salah satu bentuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah. Bermuamalah yang diterapkan di kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum *syara'* sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan dari asas bermuamalah.

Hukum setiap kegiatan muamalah adalah diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan prinsip umum muamalah yang pertama yaitu “Pada dasarnya, segala bentuk kegiatan bermuamalah adalah boleh sampai ditentukan dalil yang melarangnya”. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka muamalah itu dibolehkan (mubah). Berkaitannya dengan muamalah, pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang ingin melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Pada prinsip umum muamalah yang kedua yaitu “Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal”. Pada prinsip yang kedua memberikan kebebasan umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik dalam akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang terdapat di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Konsumen (anggota) dan pihak penyedia dana (Baitul Mal wa Tamwil) untuk melakukan pinjam-meminjam ('*ariyah*) dana. *Al-āriyah* Menurut Bahasa artinya sama dengan pinjaman, sedangkan Menurut istilah *syara'* adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya.

Allah SWT berfirman :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (QS Al Ma'idah(5): 2)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.



Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Hukum asal pinjam-meminjam adalah Sunnah sebagaimana tolong-menolong yang lain. Hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib apabila orang yang meminjam itu sangat memerlukannya. Hukum pinjam-meminjam juga bias menjadi haram bila untuk mengerjakan kemaksiatan.

Suatu kegiatan pinjam-meminjam sah apabila memenuhi rukun pinjam-meminjam, yaitu :

1. Orang yang meminjamkan :

- a. Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah meminjamkan.
- b. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau kelompok dan menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan.

2. Orang yang meminjamkan :

- a. Berhak menerima kebaikan. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjamkan karena keduanya tidak berhak menerima kebaikan.
- b. Hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam.

Suatu kegiatan pinjam-meminjam sah apabila memenuhi akad, yaitu ijab qabul. Pinjam meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada yang memilikinya. Pinjam-meminjam juga berakhir apabila salah satu dari kedua pihak meninggal dunia atau gila. Barang yang dipinjam dapat diminta

kembali sewaktu-waktu, karena pinjam-meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap.

Jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjamkan dan yang meminjam barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjam dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan.

Hukum Islam, mengenai hal muamalah harus didasari atas dasar suka sama suka dan saling merelakan, dengan adanya dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan maka akan timbul kemaslahatan diantara pihak yang melakukan perjanjian, yaitu antara anggota dengan pihak Baitul Mal wa Tamwil Assy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa.

Najamuddin At-Thufi menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar bermuamalah, bahwasanya dasar hukum tertinggi dalam bermuamalah adalah kemaslahatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota dengan Baitul Mal wa Tamwil Assy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah melakukan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas, (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), indepedensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairnees*). Telah melaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga terciptanya kemaslahatan dalam pinjam-meminjam antara anggota dengan *Baitul Mal wa Tamwil* Assy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, yaitu kemaaslahatan dalam hal memelihara harta atau *Hifdzul Māl*.

## **B. *Good Corporate Governance* (GCG)**

### **1. Pengertian *good corporate governance*(GCG)**

*Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan/meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka Panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika.<sup>23</sup>

Bahwa *Good Corporate governance* sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengatur hubungan dan tanggung jawab atau akuntabilitas perusahaan kepada anggota pemegang saham, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.<sup>24</sup>

*Governance* di ambil dari kata lain, gubernance yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* yang sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan. *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta karyawan) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

---

<sup>23</sup> <http://www.posindonesia.co.id/news>, pengertian-good-corporate-governance (23 Agustus 2019).

<sup>24</sup> Sofyan, Djalil, *Corporate Governance and Accountability* (Bandung: PT Sinar Gafika, 2001), h. 4.

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* (pegawai atau karyawan, pelanggan dan staff), berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>25</sup>

*Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (social, ekonomi, politik dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>26</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.

*Center For European Policy Study* (CEPS), mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan.

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang

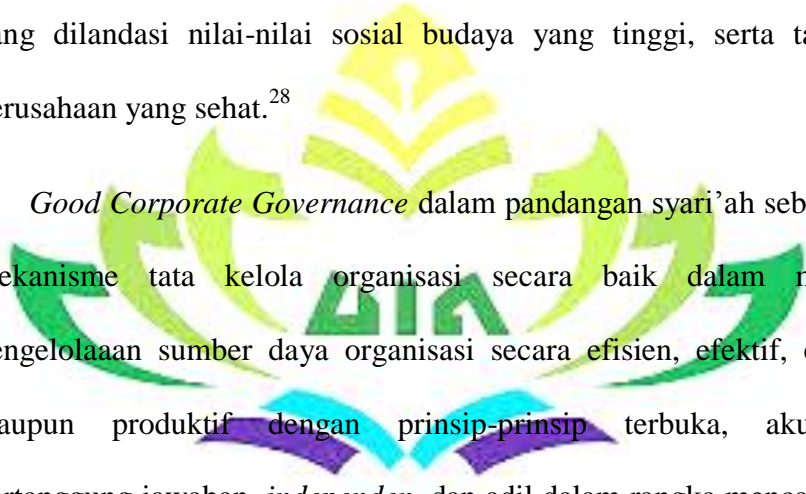
---

<sup>25</sup> Muhammad dong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam* (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, September 2017), h. 79.

<sup>26</sup> Azhar, Kazim, *Pengertian governance dalam tata kelola perusahaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 86.



kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>27</sup> Sedangkan seorang pakar *Good Corporate Governance*, dari *Indo Consult*, mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi, serta tata kelola perusahaan yang sehat.<sup>28</sup>



*Good Corporate Governance* dalam pandangan syari'ah sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggung jawaban, *independen*, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>29</sup>

*Good Corporate Governance* secara definitive merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (pegawai atau karyawan, pelanggan, dan staff). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban

---

<sup>27</sup> Sutedi, *Corporate Governance* (Bandung: PT Arta Media, 2006), h. 175.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 178.

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h. 55.

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan.<sup>30</sup>

*Corporate Governance* tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan berkaitan dengan upaya pencarian cara-cara yang dapat menjamin keputusan-keputusan dibuat secara efektif. Agar proses pembuatan keputusan perusahaan dapat berlangsung secara efektif, maka dibutuhkan hubungan yang kolaboratif diantara pihak manajemen dengan dewan komisaris. Dalam hal ini dewan komisaris tidak hanya sekedar berperan sebagai pengawas dari tindakan direksi tetapi juga berperan sebagai *partner* direksi di dalam proses pembuatan keputusan perusahaan.<sup>31</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan dengan baik serta melindungi hak pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.<sup>32</sup>

*Corporate Governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized.* Sesuai dengan definisi di atas, mengartikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar. *Corporate Governance* juga mempunyai pengaruh upaya mencapai

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>31</sup> Herwidyatmo, *Majalah Manajemen Usahawan* (Surabaya: PT Sinar Media, 2000), h. 69.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 73.

kinerja bisnis yang optimal serta analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan.<sup>33</sup>

Anggota dewan komisaris dan direksi yang memiliki saham dalam perseroan serta setiap orang dalam, dilarang menyalahgunakan informasi sehubungan dengan rencana pengembalian, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham pada umumnya dianggap sebagai informasi orang dalam. Anggota dewan komisaris, direksi dan para eksekutif perseroan yang bersangkutan dalam pelaksanaan rencana tersebut, harus memberlakukan semua pemegang saham secara adil.<sup>34</sup>

Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakan prosedur yang benar yang ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)**

*Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan dengan baik serta melindungi hak anggota, dipengaruhi oleh prinsip-prinsip di antara lain :<sup>35</sup>

Penerapan GCG sangat penting dalam dunia perkoperasian terutama koperasi syariah yang melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al- Qur'an dan hadis. Karena itu prinsip-prinsip GCG

---

<sup>33</sup> Siswanto, Sutojo, E John, Aldrige, *The Australian Stock Exchange* (Jakarta: Grafindo Media Persada, 2005), h. 3.

<sup>34</sup> <http://xerma.blogspot.com/2014/04/>, pengertian-good-corporate-governance (1 Agustus 2019).

<sup>35</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 66-67.

pada koperasi syariah pun sama saja yaitu pertama, prinsip keterbukaan (*transparency*) berarti koperasi syariah harus memberikan informasi kondisi dan kinerja koperasi tersebut secara tepat waktu, singkat, jelas, dan akurat. Informasi tersebut juga harus mudah dimengerti dan juga mudah diakses oleh stakeholder karena hal ini dapat digunakan sebagai penilaian atas tanggung jawab koperasi syariah terhadap anggotanya. Prinsip ini penting kaitannya dengan anggota karena seorang anggota akan lebih percaya apabila koperasi memberikan informasi yang akurat kepada anggotanya, dengan demikian anggota akan merasa lebih terbuka dan aman terhadap dana yang akan disimpannya

Kedua, adalah prinsip akuntabilitas (*accounttability*) dimana koperasi syariah memiliki tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi dan juga harus sesuai dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Prinsip ini berkaitan dengan sistem kerja karyawan koperasi, bagi anggota faktor kinerja juga bisa menjadi acuan untuk mempercayai koperasi tersebut. Mengapa demikian? Karena apabila kinerja para karyawan telah baik maka sistem didalamnya pun akan berjalاندengan baik, sehingga anggota dapat percaya dan merasa aman dalam menyimpan dana ataupun meminjam dana.

Ketiga adalah prinsip tanggung jawab (*responbillity*) artinya koperasi syariah harus memiliki tanggung jawab atau kepedulian yang besar terhadap segala sesuatunya, agar koperasi syariah terlihat bagus di masyarakat koperasi juga harus menjadi perusahaan yang baik, perusahaan yang baik



terlihat dari sistem operasionalnya yang berjalan dengan baik. Prinsip ini dapat dilihat dari sistem hukumnya, apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada didalam peraturan yang berlaku. Apabila sudah sesuai dengan peraturan yang ada maka anggota akan merasa aman terhadap dana yang disimpannya karena sudah ada kejelasan didalam perundang-undangan atau peraturan yang ada.<sup>36</sup>

Keempat, prinsip independensi (*indepency*) merupakan suatu sikap dimana koperasi syariah harus menghindari benturan kepentingan dari stakeholder, benturan kepentingan merupakan keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi. Prinsip ini juga penting kaitannya dengan anggota, karena anggota akan percaya terhadap suatu koperasi apabila didalamnya berjalan sesuai dengan visi dan misi, apabila ada suatu konflik didalamnya berarti dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu menjaga benturan kepentingan akan dapat membuat anggota percaya akan koperasi tersebut.

Kelima, merupakan prinsip keadilan (*fairneess*) adalah sikap dimana koperasi harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder yang berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, tetapi koperasi juga harus menerima masukan dan saran dari stakeholder demi kemajuan dari koperasi syariah. Lima prinsip ini juga merupakan acuan untuk anggota menilai suatu koperasi, karena anggota akan merasa lebih nyaman saat koperasi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 55.

dapat berlaku adil atau dalam kata lain tidak membedakan anggota satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pentingnya suatu koperasi dalam memperlakukan anggotanya dengan baik

Berdasarkan prinsip di atas dapat juga dijelaskan prinsip secara syariah yaitu. Kejujuran (*shidiq*) sangat diperlukan dalam koperasi syariah, dimana kejujuran adalah nilai yang paling besar di masyarakat, prinsip ini dapat membuat masyarakat yakin bahwa koperasi syariah baik dalam mengelola dana yang dipercayakan. Pengetahuan kepada masyarakat (*tabligh*) merupakan prinsip yang dapat memberikan informasi secara akurat, baik dan tepat, informasi ini nantinya dapat memudahkan dan membuat anggota nyaman dengan koperasi syariah karena mendapat informasi dengan benar. Kepercayaan (*amanah*) adalah prinsip yang sangat penting pula, dimana koperasi syariah harus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa koperasi syariah memang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis<sup>37</sup>

Lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di antaranya yaitu :

**a. Transparansi (*transparancy*)**

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder* (pegawai atau karyawan, pelanggan dan staff). Hal ini juga sejalan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 57.

dengan ajaran Islam yang menyerukan manusia harus bersikap jujur dan terbuka dalam segala tindakan yaitu Q.S Al-Muthafifin (83) ayat 1

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (Q.S Al-Muthafifin (83):1)

Artinya “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”.

Dalam hadis rasulullah SAW bersabda :

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَسْعُودُ بْنُ اللَّهِ عَنِ

إِلَى يَهْدِي الْبِرَّ وَإِنَّ الْبِرَّ إِلَى يَهْدِي الصِّدْقَ فَإِنَّ الصِّدْقَ عَلَيْكُمْ : وَسَلَّم



Artinya “Dari Abdullah ibn Mas’ud, dari Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya jujur itu membawa Kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga”

Dalam hadist ini memerintahkan kepada umat Islam untuk meninggalkan hal yang di dalamnya ada keraguan. Kemudian kita dituntut untuk beralih kepada hal yang tidak diragukan, karena di dalamnya ada kepastian. Selanjutnya segala yang berasal dari kejujuran akan membawa kita kepada ketenangan batin.

#### **b. Akuntabilitas (*accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola

secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam hal ini pula Islam menekankan kepada manusia agar memiliki sikap yang adil serta sesuai dengan takarannya, terutama dalam bermuamalah seperti yang ditegaskan Q.S *Huud* (11) ayat 85.



Artinya "Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan"

Dalam hadis Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضْرَبَ

بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ



وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى عَلَيْهَا

فِيهَا

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya “Dari Abu Dzar, ia berkata, “Aku berkata, ‘Hai Rasulullah! Tidaklah engkau memperkerjakan aku?’ Ia berkata, ‘Maka beliau menepuk pundakku dengan tangannya kemudian bersabda, ‘Hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya pekerjaan itu adalah amanah, dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan penyesalan di hari Kiamat kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban padanya”

#### c. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan Lingkungan serta harus mentaati praturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.<sup>38</sup> Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang diajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu peduli serta berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti yang dijelaskan Q.S *Al Qashas* (28) ayat 77.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 83.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (Q.S Al Qashas(28):77)

Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Beberapa ayat-ayat diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa *Good Corporate Governance* memperhatikan kepentingan-kepentingan anggota.

#### d. **Indepedensi (*Indepedency*)**

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prnsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini pula yang diterapkan dalam Islam bahwa apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam mempertanggung jawabkan sesuatu, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan tanpa adanya orang lian yang memikul perbuatan itu.

Dengan kata lain dalam suatu kepemimpinan itu harus bersifat mandiri.

Seperti yang diperjelas dalam Q.S *Faathir* (35) ayat 18.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

(Q.S *Faathir*(35):18)

Artinya “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).”

**e. Kewajaran (*Fairness*)**

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Dengan kata lain Islam juga menerapkan kita harus bersifat sesuai terhadap segala hal dan selalu mendirikan keadilan kepada semua manusia di muka bumi agar terciptanya kemaslahatan seperti yang dijelaskan dalam Q.S : *Al-Mā'idah* : 5 : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (QS Al Ma'idah (5): 8)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

### 3. Sejarah Singkat *Good Corporate Governance* di Indonesia

Konsep *Corporate Governance* yang komprehensif mulai berkembang sejak setelah kejadian *The New York Stock Exchange Crash* pada 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar<sup>39</sup>.

Mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana “menyembunyikan” kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Penanganan yang dilakukan tidak hanya *window dressing* tetapi juga *financial engineering*. Lazimnya pada situasi kondisi bisnis kondusif, penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan tidak ada, namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka segala macam sumber-sumber

---

<sup>39</sup> Tjager, I nyoman, *Corporate Governance* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 65.

penyimpangan (*irregularities*) dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan *profitting*, *commercial crime* hingga *economic crime*<sup>40</sup>. Kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan.<sup>41</sup> Gerakan ini dimulai dari tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Ardian Cadbury, yang pada saat itu sebagai Direktur *Koperasi of England* dan mantan CEO *Group Cadbury*<sup>42</sup>. Sejak terbitnya *Cadbury Code on Corporate Governance* pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik *good corporate governance*, antara lain ICGN (*International Corporate Governance Network*) yang mendorong *Organization for Economic Cooperation Development (OECD)* mengeluarkan *OECD Principles on Corporate Governance*. ICGN sangat berkepentingan dalam implementasi GCG, karena anggota mereka terdiri institusi dana pensiun dan asuransi yang mengelola dana anggota untuk investasi jangka panjang.

Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independen dan membentuk komite audit

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), h. 43.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>42</sup> Cadbury, A., *Report on the Committee on the Aspects of Corporate Governance* (London : Gee & Co. Ltd, 2002), h. 77.



pada tahun 1998, *Corporate Governance* mulai di kenalkan public pada seluruh perusahaan public di Indonesia<sup>43</sup>.

Setekah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan *Corporate Governance*. Pemerintah Indonesia mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor : KEP-31/M.EKUIIN/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai *Good Corporate Governance*, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *Corporate Governance* di Indonesia<sup>44</sup>.

Memalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun 2001, pedoman CG bidang Perkoperasian tahun 2004 dan Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif.

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP/49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pembentukan KOMite

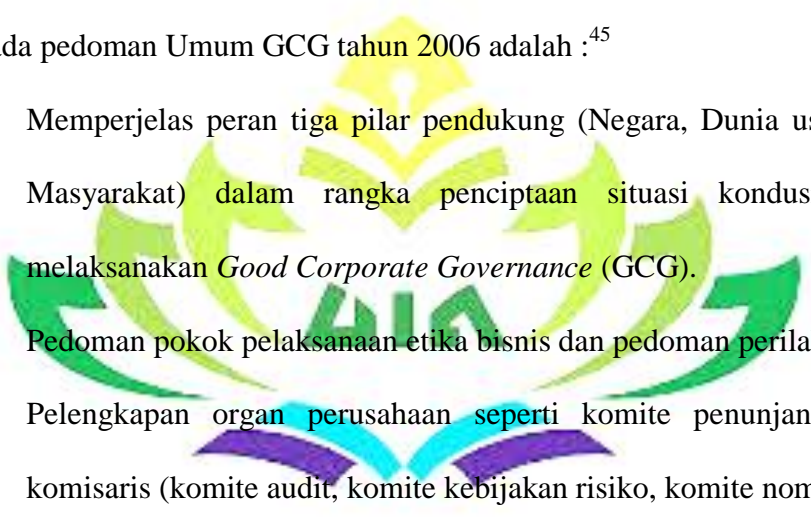
---

<sup>43</sup> Munir Fuad, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 12.

<sup>44</sup> Adjie Habib, *Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas* (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), h. 32.

Nasional Kebijakan Givernance (KNKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi *Governance* (KNKG) bukan hanya sector pelayanan publik.

KNKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah di terbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pada pedoman GCG tahun 2001 hal-hal yang dikedepankan adalah mengenai pengungkapan dan trasparansi, sedangkan hal-hal yang disempurnakan pada pedoman Umum GCG tahun 2006 adalah :<sup>45</sup>

- 
- a. Memperjelas peran tiga pilar pendukung (Negara, Dunia usaha, dan Masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG).
  - b. Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.
  - c. Pelengkapan organ perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan *corporate governance*)
  - d. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka penerapan GCG yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.
  - e. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa.
  - f. Pepenyertaan tentang penerapan GCG.
  - g. Pedoman praktis penerapan Pedoman GCG.

---

<sup>45</sup> Dorojatun, Kuncoro, Djakti, *Good Corporate Governance di Indonesia* (Jakarta : PT Indeks, 2004), h. 179.

Secara keseluruhan penegakan aturan untuk penerapan CG belum ada sanksi yang memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak menerapkannya, namun di sector perkoperasian telah dicoba untuk dimasukan beberapa hal yang terkait dengan kewajiban Koperasi dalam menerapkan CG yang berujung pada sanksi bagi koperasi-koperasi yang tidak mengikuti aturan tersebut.

#### **4. Manfaat Dalam Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**

Istilah muamalah berkembang seiring dengan perkembangan fikih Islam. Istilah ini merujuk pada hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan sesama di dunia.<sup>46</sup> Sebagai bagian dari ajaran Islam, muamalah lahir seiring dengan kelahiran Islam, bahkan sejak fase mekah. Hal tersebut dijumpai muamalah dalam Islam tidak bias lepas dari akidah, ibadah, dan akhlak. Semuanya menyatu dalam perilaku muslim. Saat seorang muslim bermuamalat, sesungguhnya ia tidak hanya berinteraksi material saja, melainkan terdapat unsur akidah, ibadah, dan muamalah di dalamnya. Tujuan bermuamalah bagi kebahagiaan ukhrawi. Muamalah adalah jembatan meraih ridha illahi. Muamalah memiliki Garapan yang paling luas, dibanding bidang-bidang lainnya. Pada akidah dan ibadah tidak diperkenankan menambah atau mengurangi. Dalam kajian dan penelitian bidang muamalah maupun bidang Syariah lainnya merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah telah disepakati menjadi bahan primer dalam penelitian muamalah. Bagi peneliti wajib membaca dengan

---

<sup>46</sup> Ahmad, Djalaludin, *Falsafah muamalah* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), h. 70.

tiliti teks-teks Al-Qur'an dan sunnah. Peneliti patut mendayagunakan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, dengan syarat memiliki keahlian yang diperlukan, seperti kemampuan dalam menetapkan Batasan, klasifikasi, dan analisis.

Al-Qur'an sebagai sumber utama dan doktrin teologis ajaran Islam termasuk di dalamnya doktrin ekonomi Islam dan praktik muamalah. Sebagai sumber yang utama dan pertama, Al-Qur'an harus dinomorsatukan oleh umat Islam dalam menentukan dan menarik doktrik atau hukum. Ayat-ayat Al-Qur'an didahulukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul, selama jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an.<sup>47</sup>

Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber kedua. Sunnah merupakan landasan empiris bagi konsep-konsep Islam, mengingat sumber hukum kedua dalam Islam ini merupakan aplikasi dan praktik dari ajaran-ajaran normatif Al-Qur'an, baik dalam wujud perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Penggunaan sunnah Nabi sebagai sumber kedua ini didasarkan pada kedudukan terhadap Al-Qur'an yang berfungsi sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Sunnah memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.
- b. Sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an dengan cara merinci ayat-ayat Al-Qur'an yang global, membatasi ayat-ayat yang mutlak, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum dalam aplikasinya.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 76.

Baitul Maal wa Tamwil Asy-syafi'iyah sendiri memiliki manfaat untuk masyarakat di antaranya adalah :<sup>49</sup>

a. Terhindar dari Riba

Keuntungan pertama dari melakukan transaksi keuangan di koperasi syari'ah adalah terhindar dari riba. Karena di dalam Islam, riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Dengan menabung uang di koperasi syari'ah, akan menghindarkan Anda dari dosa riba.

b. Berdasarkan Syariah Islam

Manfaat kedua dari menabung di BMT adalah Anda juga turut serta dalam melaksanakan syariah Islam dan telah melakukan *muamalah* berdasarkan Islam. Hal ini tentu akan menghadirkan pahala bagi mereka yang melakukannya.

c. Keuntungannya Diberikan berdasarkan Bagi Hasil

Tidak seperti koperasi konvensional yang memberikan bunga kepada anggotanya, di BMT keuntungan yang Anda dapatkan didasarkan pada sistem bagi hasil.

d. Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Meskipun berbasis syariah, bukan berarti uang yang ditempatkan tidak dijamin. Dana anggota BMT tetap dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menanggung risiko kehilangan dana anggota hingga Rp.500.000.000,-.

e. Sistem Bagi Hasil Lebih Adil dan Transparan

---

<sup>49</sup> Rohmat Susanto, wawancara dengan pihak BMT Asy-syafi'iyah, Ambarawa, 6 September 2019.



Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah Anda terhindar dari risiko bunga yang menjadi riba. Selain itu, sistem bagi hasil akan menguntungkan pihak anggota yang menyimpan dananya di koperasi syariah.

f. Memberlakukan Saldo Tabungan yang Rendah

Salah satu keuntungan dari menabung di koperasi syariah adalah hampir semua koperasi syariah nasional memberlakukan saldo tabungan yang rendah kepada anggota-anggotanya. Nilai saldo minimal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka yang ingin memiliki tabungan dengan saldo mengendap yang nilainya kecil.

g. Penabung atau Anggota adalah Mitra BMT

Tidak seperti koperasi konvensional, hubungan yang terjalin antara penabung dan BMT lebih cenderung menjadi hubungan antara debitur dan kreditur. Sementara di BMT, pihak BMT akan menganggap penabung adalah mitra sehingga berhak menerima hasil dari investasi yang ditanamkan di BMT.

h. Dana Anggota Dipergunakan Sesuai dengan Syariah

Salah satu keunggulan dan manfaat dari menabung di koperasi syariah adalah dana yang dimanfaatkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah. Sementara anggota koperasi konvensional tidak akan tahu uangnya akan ditempatkan atau dipergunakan untuk apa sehingga tidak menutup kemungkinan keuntungan yang diperoleh karena riba.

- i. Adanya Peringatan Dini tentang Bahaya karena Sifatnya yang Transparan

Manfaat yang satu ini mungkin tidak didapatkan jika Anda menabung di koperasi konvensional. Anggota yang menabung di koperasi syariah akan diberikan isyarat bahwa terjadi sesuatu yang tidak baik. Dengan adanya informasi tersebut, anggota bisa melakukan antisipasi terkait apa yang perlu mereka lakukan untuk menyelamatkan dananya.

- j. Dana Ditujukan untuk Kepentingan dan Kemaslahatan Umat

Keunggulan yang Anda dapatkan bila menabung di koperasi syariah ialah dana yang disimpan ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dengan kata lain, dana tersebut adalah dana umat yang didapatkan dari umat dan akan dikembalikan untuk kepentingan umat.

## **5. Hikmah di Syariatkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

### **a. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah SWT**

Terdapat dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ (QS. Al-Jumu'ah(62): 9-10)

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi, dengan cara mencari akhirat serta merta karena Allah SWT atas dasar keimanan yang utuh. Maka, di ajurkan bagi setiap umat muslim harus menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT.

#### b. Mejaui Riba

Terdapat dalam firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

(QS.Al-Baqarah(2): 275)

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ”

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli.

#### c. Menegakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

Terdapat dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(QS. Annisaa' (4): 29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan, perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ”

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi

atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.<sup>50</sup>

Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

#### **d. Menjaga Kehalalan Rezeki**

Dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri. Bias menjadi riba atau gharar, praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern. Pertimbangan etik larangan riba, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara system etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil.<sup>51</sup>

#### **e. Produktivitas dan Perputaran Ekonomi**

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat.

---

<sup>50</sup> Nasution, bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi* (Bandung, Books Terrace & Library : 2007), h. 44.

<sup>51</sup> Efa, Rodiah, Nur, "Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2015), diakses di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>. (3 Agustus 2019).



Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saha yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

Produktivitas dan perputaran ekonomi merupakan dua indikator yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Memiliki dana yang cukup besar. Setiap negara tidak terkecuali Indonesia mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun yang ditandai dengan peningkatan perkembangan peningkatan produktivitas, namun di Indonesia tidak demikian, perkembangan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas berfluktuasi.<sup>52</sup>

Pendidikan, kesehatan, investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Secara parsial investasi swasta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas ekonomi. Kenaikan investasi swasta mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan modal atau pembentukan modal menyebabkan pembaruan teknologi yang digunakan yang berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa.

---

<sup>52</sup> Citra, Ramayani, "Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal kajian ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (2012), h. 47. Di akses di <http://www.google.com/url/media/publications/7094/>, -ID-analisis-produktivitas-tenaga-kerja-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia. (5 Agustus 2019).

Peningkatan produksi barang dan jasa menyebabkan meningkatnya output dalam perekonomian. Peningkatan output menyebabkan meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan karena penurunan investasi mengindikasikan telah terjadinya penurunan penanaman modal atau pembentukan modal. Penurunan atau pembentukan modal mengakibatkan ketertinggalan teknologi terbaru yang berakibat produksi barang dan jasa tidak lancar. Penurunan produksi barang dan jasa menyebabkan output yang dihasilkan menjadi rendah. Output yang rendah akan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja rendah.<sup>53</sup>

#### **f. Memperbanyak Networking dan Menjalin Silaturahmi**

Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Amalan dalam Islam tidak hanya berupa ibadah seperti shalat baik wajib maupun shalat sunah, puasa, zakat, dan sebagainya melainkan juga menjalin tali silaturahmi. Manjalin silaturahmi adalah salah satu mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi dengan sanak keluarga dan saudara.<sup>54</sup> Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat. Berbagai kebutuhan akan kita beli di orang yang berbeda, untuk itu setiap transaksi jual beli kita akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>54</sup> <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/akhlaq/keutamaan-menyambung-tali-silaturahmi/amp>. (1 Agustus 2019).

setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki kita.

Untuk itu, umat Islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba.

### C. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan tentang penelitian yang berkaitan.

Sebagaimana deskripsi dalam latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada pengelolaan dana simpanan anggota.

Penelitian ini dilakukan oleh Tika Wati (2016) dengan judul *Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perkoperasian Syariah)*. Hasil penelitian mengemukakan Perkembangan good corporate governance (GCG) di dunia semakin lama semakin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Konsep GCG yang menghendaki perbaikan seluruh sistem dan struktur perusahaan telah menjadi satu nilai yang diterima bersama dalam komunitas bisnis. Pada

prinsipnya, implementasi GCG relevan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Islam menghendaki agar setiap aspek kehidupan diatur dengan sistem dan struktur yang memenuhi best practices yang digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah dua konsep ideal ini harus berjalan seiring. GCG menjadi bagian integral dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh. Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim.

Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip 'adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi) dan kebebasan yang bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syariah), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira'ah dan islah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).<sup>55</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh ahmad Fauzan (2013) dengan judul Implementasi *good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah hasil penelitian menunjukan Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada koperasi syariah hendaknya mengacu pada lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran.

---

<sup>55</sup> Tika Wati, *Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)* ISSN 0128-4878 (Print) ; ISSN 2289-5639, Jurnal Ekonomi Islam Vol VI No.1 Januari 2016, Diakses Pada 1 Februari 2018. Diakses Pada 2 Agustus 2019.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, koperasi harus menyesuaikan dengan prinsip Islam dalam operasional perkoperasian. Oleh karena itu, peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada koperasi syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional koperasi telah sesuai dengan prinsip Islam. Peranan DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada koperasi syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah. DPS juga harus mendiseminasikan dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun majlis ta'lim.<sup>56</sup>

Penelitian lain juga dilakukan oleh Indra Siswati dengan judul Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Koperasi Syariah hasil Penelitian : Uji direct impact menghasilkan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja BUS. Penerapan GCG berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja. Uji indirect impact menyatakan risiko pembiayaan memediasi pengaruh penerapan GCG terhadap Kinerja BUS<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Ahmad Fauzan, Implementasi *Good Corporate Governance* Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah, ISBN: 978-1-922069-44-3, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba Vol VII No.1 Juli 2013, Diakses Pada 1 Agustus 2019.

<sup>57</sup> Indra Siswati, Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Bank Syariah, Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 7 Nomor 2 Halaman 156-323 Malang, Agustus 2016 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879, di akses 2 Agustus 2019.



Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah gambarkan tersebut diatas, terdapat beberapa persamaan, yakni pembahasan mengenai Implementasi GCG pada lembaga keuangan syariah.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil BMT Asyafiyah Kecamatan Ambarawa**

###### **1. Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT)**

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau dengan oleh pelayanan koperasi islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadi'ah). Karena itu, meskipun mirip dengan koperasi Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari koperasi Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perkoperasian serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan.<sup>58</sup>

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya

---

<sup>58</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363.

berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul mal Wat Tamwil bias juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.<sup>59</sup>

## **2. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Assyafīyah Kecamatan Ambarawa**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafīyah Kecamatan Ambarawa dengan bandan hukum No.27/BH/KDK.7.3/1998. Merupakan salah satu KSPPS primer yang beralamatkan di Jln. Ahmad Yani No. 10 Ambarawa, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. KSPPS BMT Assyafīyah Kecamatan Ambarawa sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul Maal.

Sebagai Baitul Tamwil bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan muamalah. Sebagai Baitul maal, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembang amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqoh dan waqaf.

---

<sup>59</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta: Prenadamedia Group 2015),h. 452.

BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa dirintis sejak Tahun 2002 dan tumbuh berkembang dengan baik di tengah perekonomian masyarakat yang mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan. Sehingga pada akhirnya berhasil mengembangkan kantor cabang dari tingkat kecamatan ke tingkat provinsi. *Antusiasme* masyarakat yang cukup tinggi terhadap keberadaan BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa, meskipun di tengah stigma negative yang berkembang dimana banyak koperasi sejenis yang muncul kemudian hilang.

Tentu saja dengan tenaga pengelola yang profesional dan handal serta mengedepankan integritas pada akhirnya BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa dapat menjadi solusi bagi masyarakat. Terutama yang ingin mengembangkan usahanya namun terkendala oleh keterbatasan modal.

Sehingga BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang pada akhirnya mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sesuai dengan budaya organisasi yang diterapkan yakni CERIA “Bekerja dan melayani anggota dengan suasana hati gembira, ikhlas, semangat dan antusias.

Berlandaskan pada C “*collaboration*” dalam rangka membangun kebersamaan, bekerja sama dengan saling menjaga, percaya dan memahami. E “*Exellent*” bekerja dengan antusias dan ikhlas memberi pelayanan terbaik menuju prestasi. R “*Respect*” hormat, peduli dan ramah

terhadap anggota. I “*Integerity*” mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan serta tata kelola organisasi terbaik. A “*Accountability*” antusias, penuh tanggung jawab dalam bersikap, bekerja, dan melayani.

Kini KSPPS BMT Asy-syafiyyah memiliki 8 kantor cabang dan baitul maal yang tersebar di berbagai daerah Provinsi Lampung. Salah satunya adalah KSPPS BMT Asy-syafiyyah Kecamatan Ambarawa yang dibuka pada tanggal 12 Agustus 2002 beralamat di Jl. Ahmad Yani No.10 Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

### **3. Landasan Hukum**

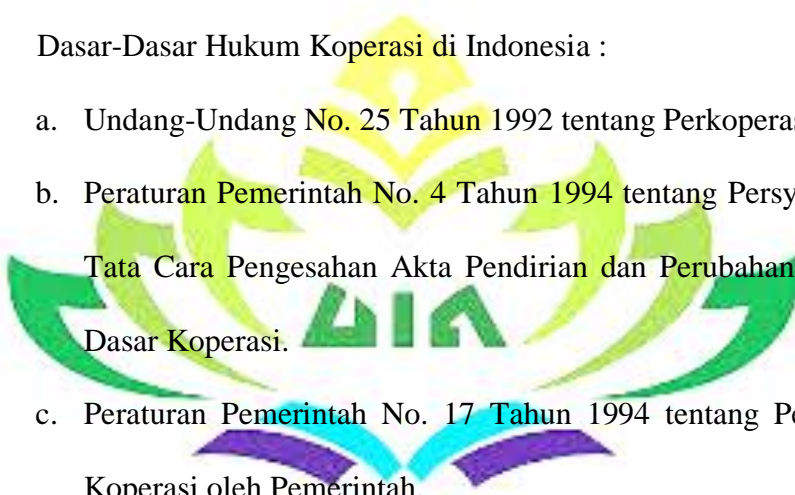
Baitul Mal wat Tamwil yang lebih dikenal dengan BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang biasanya berbadan hukum koperasi, yang lebih dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS). Dalam opsionalnya telah dijabarkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor, 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Menurut Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai ciri khas melakukan



kegiatan profit oriented dengan Baituttamwilnya, dan social oriented dengan Baitulmaalnya.<sup>60</sup>

Tujuan umum tentang koperasi, dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.<sup>61</sup>

Dasar-Dasar Hukum Koperasi di Indonesia :

- 
- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  - c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
  - d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
  - e. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
  - f. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PMK No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

---

<sup>60</sup> Muhammad Tho'in, "Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali". Jurnal Muqtasid, Vol. 2 No. 1 (Juli 2011), h. 82.

<sup>61</sup> Supriyadi, supriyadi, "Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Social Legal Research". Joernal Al- 'Adalah, Vol.13, No. 2 (2016), diakses di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/search>, (1 Agustus 2019).

Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal, antara lain :

- a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- b. Landasan Struktural dan Landasan Gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD N RI 1945)
- c. Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh Undang-Undang sebagai suatu perusahaan.

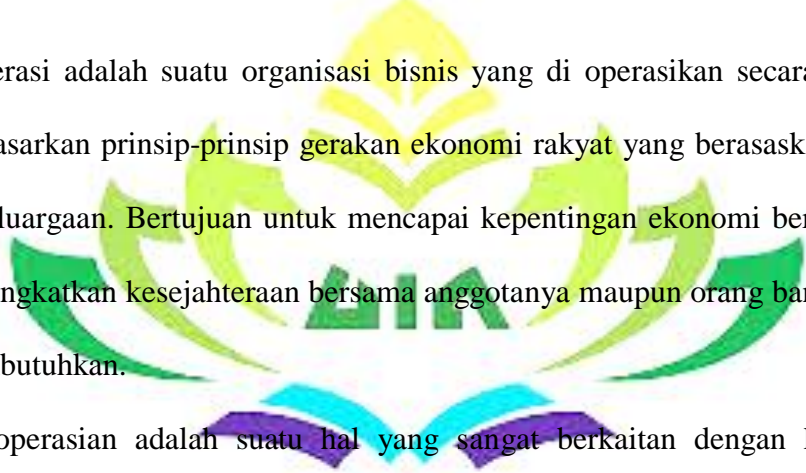
Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggota.

Prinsip koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, sebagai berikut :

- a. Pengelola koperasi dijalankan secara demokrasi.
- b. Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di jual anggotanya.
- c. Koperasi harus bersifat mandiri.
- d. Balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 koperasi merupakan organisasi kerakyatan bersifat sosial, anggotanya orang-orang yang termasuk dalam tetapan ekonomi bersifat usaha bersama dan berasaskan pada kekeluargaan, maka dari itu koperasi di Indonesia di lindungi oleh Badan Hukum yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan :

- 
- a. Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang di operasikan secara bersama berdasarkan prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kepada kekeluargaan. Bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama dan meningkatkan kesejahteraan bersama anggotanya maupun orang banyak yang membutuhkan.
  - b. Perkoperasian adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan koperasi.
  - c. Koperasi primer ialah suatu koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang dimana setiap anggotanya berjumlah perorangan.
  - d. Koperasi Sekunder adalah gabungan suatu badan koperasi yang memiliki jangkauan kerjanya sangat merata dan luas.

Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perekonomian yang bersifat terpadu dan terarah untuk menuju tercapainya suatu cita-cita bersama.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam.

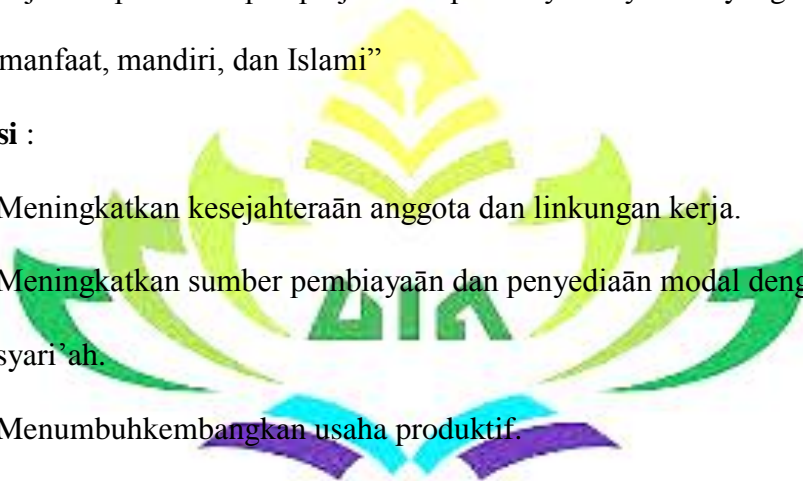
#### **4. Visi dan Misi**

##### **a. Visi :**

“menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari’ah yang sehat, kuat, bermanfaat, mandiri, dan Islami”

##### **b. Misi :**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyedia modal dengan prinsip syari’ah.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha produktif.
- 4) Dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.
- 5) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota efektif, efisien, professional dan transparan.
- 6) Menjalinkan kerjasama usaha dengan berbagai pihak.



## 5. Struktur Organisasi

### a. Pengurus

Ketua : **ROHMAT SUSANTO**

Sekretaris : **SUPADIN**

Bendahara : **MUDHOFIR**

### b. Pengawas

Ketua : **Drs. Hi. Slamet Widodo, M.Si**

Anggota : **Drs. Muhibakir**

Anggota : **Drs. Hi. Haryono, M.Pd**

### c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : **Nur Fauzan, S.Pt**

Anggota : **Drs. Hi. Aziz Sukarsih**

Anggota : **Syamsodin, S.Pd**

### d. Pengelola

Pengelola BMT Assy-syafiyyah Kecamatan Ambarawa terdiri dari manajer, Kepala Devisi, dan Karyawan yang diangkat oleh pengurus. Pada Tahun buku 2017, terdapat 2 orang manajer yaitu seorang manajer Operasional dan manajer Bisnis. Dalam pengelolaannya, manajer dibantu oleh 7 orang kepala devisi yang masing-masing menguasai bidangnya. Selain itu, untuk mengoperasionalkan BMT Assyfiyyah juga dibantu dan didukung sepenuhnya oleh 8 pimpinan cabang dan 1 orang pimpinan baitul maal. Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KSPPS BMT Assy-syafiyyah Kecamatan Ambarawa :




1) Pengawas

Menjalani jalannya operasional KSPPS BMT Assy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru KSPPS BMT Assy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa yang diawasi sesuai ketentuan syari'ah.

2) Dewan Pengawas

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

3) General manager

- 
- The logo of KSPPS BMT Assy-syafi'iyah is a stylized emblem. It features a central yellow sun-like symbol with rays, surrounded by green and blue curved lines that form a circular, lotus-like shape. The letters 'KSPPS' are integrated into the design in a green, blocky font.
- a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat Dewan Pengurus dan sudah disetujui BMT.
  - b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi *financing* dan *non financing* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mrndapatkan persetujuan RAT.
  - c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
  - d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
  - e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

4) Manajer

- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.

- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT dan non RAT.
- c. Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja dan baitul tamwil, baitul maal, *quantum quality*, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

#### 5) Admin Pembiayaan

- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota.
- b. Menyusun rencana pembiayaan.
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- e. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- f. Melakukan analisis pembiayaan.
- g. Melakukan administrasi pembiayaan.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

#### 6) Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manejer cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta di dokumentasikan pada pembukuan.

## 7) Marketing

- a. Bertanggung jawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bias datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
- d. Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

## 6. Produk-Produk BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa

Produk KSPPS BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa terbagi menjadi dua yaitu :

### a. Produk Simpanan

Untuk mendapatkan pelayanan produk KSPPS BMT Assy-safi'iyah Kecamatan Ambarawa terlebih dahulu harus menjadi anggota, dan syarat menjadi anggota adalah :

- 1) Memiliki kartu identitas (SIM/KTP/KK)
- 2) Mengisi formulir pendaftaran permohonan menjadi anggota
- 3) Membuka saldo awal minimal Rp.20.000,-
- 4) Simpanan khusus Rp.20.000,-

- 5) Bagi yang sudah menjadi anggota dan memiliki rekening BMT Asy-syafi'iyah akan mendapatkan buku simpanan dan akan mendapatkan bingkisan menarik pada setiap tahun pembagian hadiah.
- 6) Syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh BMT.

Adapun produk-produk KSPPS BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa adalah sebagai berikut :

1) Ceria Utama

Simpanan keuntungan dengan system keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian yang diberikan tiap bulan dengan setoran awal Rp.10.000,- dan saldo rata-rata minimal Rp.10.000,- setiap bulannya.

2) Ceria Pintar

Simpanan untuk persiapan san keperluan anak sekolah, menggunakan akad "*wadiah Yad Dhomanah*" simpanan yang di khususkan untuk pendidikan. Pengembaliannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

3) Ceria Kurban

Simpanan untuk persiapan ibadah kurban, menggunakan akad "*wadiah yad dhomanah*" dengan pembukaan rekening atas nama

perorangan, dengan setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik.

4) Ceria Prima

Simpanan menggunakan akad “*wadiah yad dhomanah*”, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp.10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

5) Ceria Ketupat

Produk simpanan, yang setorannya ada batas waktu tertentu dengan system paket yang berlaku ditahun berjalan menggunakan akad “*wadiah yad dhomanah*”, dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik.

6) Ceria Ikhrom

Simpanan persiapan untuk ibadah Haji/Umroh, akad simpanan menggunakan “*wadiah yad dhomanah*”, bonus menarik.

7) Ceria Berkah

Simpanan berjangka syariah yang ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui system bagi hasil yang dikelola secara syari’ah.

b. Produk Pembiayaan

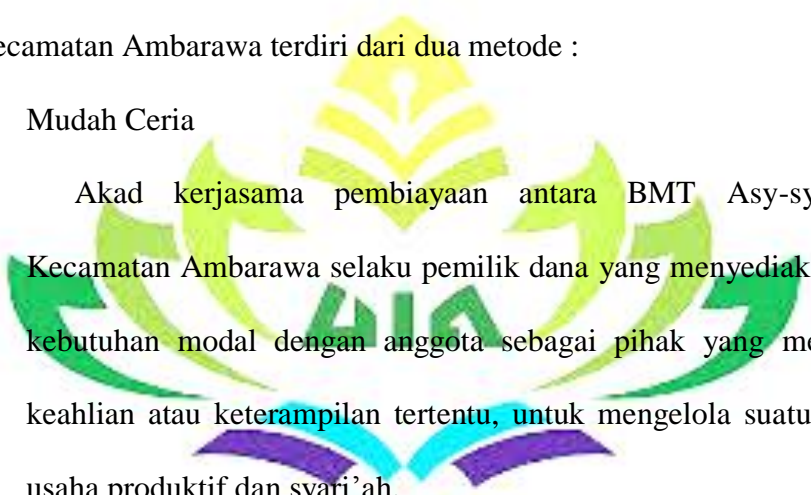
Berikut beberapa jenis produk pembiayaan yang ada di BMT Asy-syafiyyah Kecamatan Ambarawa :



### 1) Pembiayaan Bagi Hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada koperasi dan koperasi konvensional metode pembiayaan bagi hasil yang ada di KSPPS BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa terdiri dari dua metode :

#### a) Mudah Ceria

The logo of BMT Asy-syafi'iyah is a stylized emblem. It features a central yellow sun-like shape with rays, surrounded by green and blue curved lines that form a circular, flower-like pattern. The text 'BMT ASY-SYAFI' IYAH' is written in a stylized font across the center of the emblem.

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha produktif dan syari'ah.

#### b) Sama Ceria

Merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

### 2) Pembiayaan Jual beli

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan *sector real*, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjual belikan. Disamping itu harga

yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad.

Metode pembiayaan jual beli yang ada di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa dikenal dengan murabahah Ceria. Dimana akad jual beli antara BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. BMT akan menawarkan barang yang akan dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

### 3) Pembiayaan Jasa

Pembiayaan jasa yang ada di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa terdiri dari dua jenis yaitu :

#### a) Hawalah Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

#### b) Ihrom Ceria

Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, anggota menggunakan akad ijarah multi jasa dengan jangka waktu tertentu.

### 4) Pembiayaan Kebijakan

Produk pembiayaan kebijakan yang ada di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa berupa *Al-Qard* Ceria. Produk ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota yang harus dikembalikan pada

waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersil akan menagih kepada pihak yang berhutang yang terutang tersebut.

## **B. Strategi dan Pengelolaan *Good Corporate Governacnce* (GCG) di BMT Asy-syafiyyah Kecamatan Ambarawa**

Adapun strategi dalam pemasaran pada BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu :

1. C “Collaboration” dalam rangka membangun kebersamaan, bekerja sama dengan saling menjaga, percaya dan memahami.

Manusia sebagai makhluk social dituntut untuk bersosialisasi yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Demikian pula saat berada di lingkungan pekerjaan. Tanpa berhubungan baik dengan rekan sekerja maupun atasan dan bawahan, rutinitas kerja terasa hambar.

Berpikir positif dapat membuat seluruh orang dalam lingkungan kerja dapat saling berhubungan baik. Kendati demikian, bukan berarti debat tidak diperlukan, karena setiap insan memiliki cara pandang yang berbeda. Tapi, bagaimana cara kita memandang perdebatan itu secara positif. Karena, jika *team work* tidak bagus dan tidak dibangun, maka akan membuat kelangsungan ke depannya tidak berjalan baik. Jika masalah perusahaan itu dikelola dengan conflict management, maka ke depannya pasti jadi tidak berjalan dengan baik. Jadi untuk membentuk *team work* itu juga covernya harus bagus.

2. **E** “Exellent” bekerja dengan antusias dan ikhlas memberi pelayanan terbaik menuju prestasi.

Amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas adalah amal yang memiliki nilai dan makna yang sangat tinggi. Sekecil apa pun amal yang dilakukan, harus didasarkan atas niat yang ikhlas. Dengan tidak tulus, maka amal menjadi sangat bermakna. Sebaliknya amal yang dilakukan dengan tidak ikhlas, maka amal menjadi tidak memiliki nilai apa-apa. Oleh sebab, ketika melakukan sebuah amal, amal apa pun, yang kecil maupun yang besar, maka lakukanlah dengan ikhlas.

3. **R** “Respect” hormat, peduli dan ramah terhadap anggota.
4. **I** “Integrity” mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan serta tata kelola organisasi terbaik.
5. **A** “Accountability” antusias, penuh tanggung jawab dalam bersikap, bekerja, dan melayani.

Strategi pemasaran dengan mengusung tema “CERIA” ini bertujuan untuk menjadi suatu program yang di terapkan ditengah-tengah masyarakat dengan menjadikan suatu pemahaman antara apa saja produk-produk pelayanan dalam pengelolaan yang ada di BMT Asy-syafi’iyyah Kecamatan Ambarawa.

Menjalankan aktivitasnya memerlukan banyak strategi yang harus dilakukan salah satunya adanya penerapan *Good Corporate Governance* sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap *Stict Holder*. GCG merupakan

suatu tata kelola yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas, (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*indepency*), dan kewajaran (*fairnees*).<sup>62</sup> Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Salah satu lembaga yang tidak terlepas dari penerapan GCG, yang bersifat informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Salah satu fungsi sebagai lembaga panerima dan penyalur dana masyarakat sehingga perlu adanya penerapan GCG sebagai wujud tata kelola perusahaan yang baik.<sup>63</sup>

Namun, berdasarkan wawancara sebagian kecil para anggota memiliki pemahaman berbeda sehingga berbanding terbalik dengan prinsip apa yang sudah menjadi program, dimana anggota hanya memahami bahwasanya dana yang ia tabung hanya disimpang dan dijaga oleh pihak BMT.<sup>64</sup>

Penerapan Good corporate governance (GCG) lebih lanjut menurut pimpinan BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa memang menerapkan prinsip-prinsip sifat nabi yang disingkat dengan STAF yaitu

---

<sup>62</sup> Bapak, Andi, Wawancara, Nasabah, BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. 4 September 2019.

<sup>63</sup> Ibu, Ranti, Wawancara, Nasabah, BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, 3 September 2019.

<sup>64</sup> Ibu, Ngatemi, Wawancara, Nasabah, BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa, 3 September 2019.



Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathanah, yang mana prinsip syari'ah tersebut merupakan bagian dari sistem syari'ah.<sup>65</sup>

Hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa, bahwa anggota menilai pelayanan yang ada di BMT sudah cukup baik, namun harus lebih ditingkatkan agar anggota semakin merasa aman menitipkan dananya di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa.<sup>66</sup>



---

<sup>65</sup> Rohmat, Susanto, Ketua BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, 3 September 2019.

<sup>66</sup> Bapak, Deni, Wawancara, Nasabah, BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, 3 September 2019.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Praktek Pengelolaan Dana Anggota terhadap *Good Corporate Governance* (GCG)**

Kegiatan utama yang dilakukan BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan sebagai suatu lembaga yang mampu menjembatani antara pihak yang kelebihan dan yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan fungsinya, menyalurkan dana dari masyarakat biasanya lembaga keuangan hanya menerima pengajuan pinjaman apabila terjadi keamanan dan keuntungan dari dana yang disalurkan tersebut.

Berdasarkan penjelasan masing-masing indikator GCG diperoleh hasil bahwa :

Indikator transparansi koperasi yang terdapat di BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa adalah baik. Transparansi ini dilihat dari beberapa hal yaitu penyampaian laporan keuangan, rencana pelaksanaan kegiatan dan pola penggajian. Hal ini sangat penting untuk disampaikan secara transparan ke seluruh anggota sehingga seluruh anggota memiliki gambaran yang jelas terkait kondisi koperasi, sehingga pengambilan keputusan terkait kebijakan bisa dilakukan dengan tepat.

Indikator akuntabilitas dalam koperasi di BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa adalah baik. Akuntabilitas dilihat dari beberapa hal yaitu:terkait pemisahan fungsi / bagian dalam koperasi, job description,

standar operasional prosedur (SOP), sistem bonus dan sanksi. Pemisahan fungsi sangat penting dalam koperasi sehingga masing-masing jelas kewajiban dan tanggungjawabnya termasuk job description. Job description ini akan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan jika terdapat pelanggaran atau penyimpangan, maka ada sanksi yang diberikan.

Berdasarkan hasil analisis, indikator responsibilitas koperasi di BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa adalah baik. Responsibilitas koperasi dilihat dari aspek apakah kegiatan yang dilakukan koperasi sudah sesuai dengan rencana yang disetujui dalam RAT, apakah perkembangan koperasi secara periodik disampaikan kepada anggota dan apakah pajak beserta laporan pajak sudah dilakukan tepat waktu atau tidak. Hal ini tentunya sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota koperasi sehingga pengambilan keputusan menjadi tepat.

Berdasarkan hasil analisis, indikator independensi koperasi di BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa adalah baik. Independensi koperasi dilihat dari aspek ketentuan dalam rekrutmen pegawai, penyusunan rencana kerja dipengaruhi oleh anggota atau tidak, dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh anggota atau tidak. Ketentuan rekrutmen harus jelas dan terstruktur sehingga diharapkan diperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan harus bebas dari campur tangan pihak lain/anggota sehingga keputusan yang diambil tepat.

Berdasarkan hasil analisis, indikator fairness koperasi di BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa adalah baik. Fairness koperasi dilihat dari aspek apakah anggota memiliki akses untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan koperasi, apakah terdapat pertemuan rutin dengan anggota dan apakah perlakuan terhadap karyawan yang berasal dari keluarga anggota dan dari luar sama atau tidak. Aspek keadilan dan kesetaraan ini akan menjadi penting untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif karena seluruh karyawan mendapat perlakuan yang sama.

Pelaksanaan GCG secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tentunya menunjukkan koperasi yang ada di BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa dikelola secara professional sehingga diharapkan keberlangsungan hidup dan perkembangan koperasi bisa lebih baik.

## **B. Hukum Islam tentang *Good Corporate Governance* (GCG)**

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya akan membutuhkan orang lain. Salah satu bentuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah. Bermuamalah yang diterapkan di kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum *syara'* sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan dari asas bermuamalah.

Hukum setiap kegiatan muamalah adalah diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan prinsip umum muamalah yang pertama yaitu “Pada dasarnya, segala

bentuk kegiatan bermuamalah adalah boleh sampai ditentukan dalil yang melarangnya”. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka muamalah itu dibolehkan (mubah). Berkaitannya dengan muamalah, pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang ingin melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Pada prinsip umum muamalah yang kedua yaitu “Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal”. Pada prinsip yang kedua memberikan kebebasan umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik dalam akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang terdapat di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Konsumen (anggota) dan pihak penyedia dana (Baitul Mal wa Tamwil) untuk melakukan pinjam-meminjam (*'ariyah*) dana. *Al-āriyah* Menurut Bahasa artinya sama dengan pinjaman, sedangkan Menurut istilah *syara'* adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya.

Dalam QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadaya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Hukum asal pinjam-meminjam adalah Sunnah sebagaimana tolong-menolong yang lain. Hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib apabila orang yang meminjam itu sangat memerlukannya. Hukum pinjam-meminjam juga bias menjadi haram bila untuk mengerjakan kemaksiatan.

Suatu kegiatan pinjam-meminjam sah apabila memenuhi rukun pinjam-meminjam, yaitu :

3. Orang yang meminjamkan :

- c. Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah meminjamkan.
- d. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau kelompok dan menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan.

4. Orang yang meminjamkan :



- c. Berhak menerima kebaikan. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjamkan karena keduanya tidak berhak menerima kebaikan.
- d. Hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam.

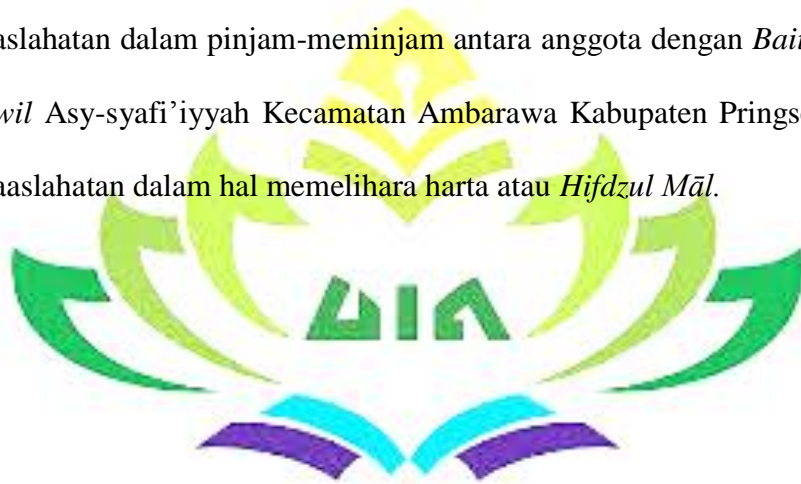
Suatu kegiatan pinjam-meminjam sah apabila memenuhi akad, yaitu ijab qabul. Pinjam meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada yang memilikinya. Pinjam-meminjam juga berakhir apabila salah satu dari kedua pihak meninggal dunia atau gila. Barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu, karena pinjam-meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap.

Jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjamkan dan yang meminjam barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjam dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan.

Hukum Islam, mengenai hal muamalah harus didasari atas dasar suka sama suka dan saling merelakan, dengan adanya dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan maka akan timbul kemaslahatan diantara pihak yang melakukan perjanjian, yaitu antara anggota dengan pihak Baitul Mal wa Tamwil Asy-syafi'iyyah Kecamatan Ambarawa.

Najamuddin At-Thufi menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar bermuamalah, bahwasanya dasar hukum tertinggi dalam bermuamalah adalah

kemaslahatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota dengan Baitul Mal wa Tamwil Assy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah melakukan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas, (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), indepedensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairnees*). Telah melaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga terciptanya kemaslahatan dalam pinjam-meminjam antara anggota dengan *Baitul Mal wa Tamwil Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu*, yaitu kemaaslahatan dalam hal memelihara harta atau *Hifdzul Māl*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan tinjauan hukum Islam terhadap *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan nasabah pada BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan telah diketahui bahwa masyarakat mengenal GCG, hal ini dibuktikan dalam analisis prinsip-prinsip GCG di BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing koperasi itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan terhadap nasabah. Agar nasabah dapat percaya terhadap industri koperasi. Penerapan GCG menjadi suatu kebutuhan mengingat Koperasi memiliki fungsi mengelola dana publik (nasabah). BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Diantaranya yaitu, koperasi menyampaikan informasi produk jasa dengan jelas, koperasi menyampaikan laporan keuangan seperti kas, laporan laba rugi, laporan neraca, secara transparan (*transparency*). Koperasi telah berjalan sesuai dengan standar operasional dan manajemen (SOM) dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, tidak terdapat rangkap jabatan atau jabatan kosong pada koperasi, setiap divisi atau bagian pada koperasi diisi oleh seorang yang kompeten dibidangnya (*accountability*). Koperasi

memiliki pengaman yang baik terhadap semua dokumen, koperasi rutin menyelenggarakan RAT setiap tahun, koperasi telah memiliki legalitas atau berbadan hukum, koperasi mematuhi setiap komitmen baik dengan anggota maupun pihak lain (*responsibility*). Pengelolaan koperasi telah dilakukan secara profesional, para pemegang jabatan tidak memiliki kepentingan khusus yang menguntungkan dirinya maupun kelompoknya, koperasi tidak mudah diintervensi pihak manapun (*independency*). Anggota dilakukan sama atau tidak dibedakan, anggota telah mendapat pelayanan yang berkualitas (*fairness*).

2. Tinjauan hukum Islam terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) pada BMT Asy-syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan manajemen risiko menurut perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan hukum Islam, dengan etika ekonomi yang terkandung dalam nilai-nilai hukum Islam. Yaitu, kejujuran (*shidiq*), pengetahuan kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), pengelolaan secara profesional (*fathanah*), yang mendukung terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG), yang merupakan bagian dari sistem syari'ah yang dilaksanakan secara baik dan professional.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan praktek yang terjadi di BMT Asy-Syafi'iyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sesuai dengan hukum Islam,

namun sebagian nasabah ada yang belum memahami tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Maka diperlukan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menghindari penyimpangan ekonomi, pihak koperasi sejatinya harus tetap mempertahankan serta mensosialisasikan kinerja dalam penerapan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) kepada anggota.
2. Penelitian ini belum komprehensif, karena hanya melihat kinerja organisasi dari segi pendekatan proses, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti kinerja organisasi di Lembaga koperasi dapat menggunakan pendekatan output, yaitu mengukur produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh Lembaga koperasi.

